Halaman 6

Sriyanto Ungkap Ada OPD Belum Gunakan Dana

Anggota Dewan Soroti Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

SEMARANG, TRIBUN - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan refocusing untuk anggaran belanja tidak terduga (BTT) penanganan virus corona. Data yang dihimpun Tribun, sebanyak Rp 1,987 triliun dialokasikan untuk BTT di Jateng. Namun, data hingga 18 Juli 2020, baru Rp 558,974 miliar yang terserap OPD yang menangani Covid-19. Artinya, baru 28,13 persen anggaran untuk penanganan pandemi.

Bahkan, sejumlah OPD belum mencairkan atau merealisasikan anggaran hasil refocusing untuk penanganan corona tersebut. Hal itu terungkap saat Rapat Badan Anggaran DPRD Jateng baru-baru ini. "Di depan (anggota, red) Banggar, Pak Sekda (Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie, red) melaporkan ada OPD yang 0 persen, artinya belum menggunakan dana untuk penanganan Covid-19 tersebut," kata anggota Banggar DPRD Jateng, Sriyanto Saputro, Minggu (26/7).

OPD yang disebut belum merealisasikan dana Covid-19 yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK), dan RSUD Tugurejo Semarang. RSUD Tugurejo Semarang menjadi satu-satunya RSUD yang dikelola pemprov yang belum merealisasikan dana covid.

Sriyanto menanyakan perencanaan yang dinilainya kurang matang yang dilakukan OPD tersebut. Misalnya, di Dishub, alokasi dana sebesar Rp 16 miliar digunakan untuk keperluan di posko pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah yang ada di 19 titik. Yakni untuk pengadaan alat pelindung diri personel, stiker, dan masker.

"Ternyata, penyakatan di posko itu sudah ditangani Polri, sehingga dana tidak terpakai," jelas wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu.

STORY HIGHLIGHTS

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Rp 1,987 triliun untuk penangan Covid-19
- Ada beberapa OPD yang belum gunakan anggaran Pemprov Jateng itu
- Banggar DPRD Jateng minta OPD yang ampu anggaran Covid-19 bikin laporan tertulis

IST

SRIYANTO SAPUTRO
ANGGOTA BANGGAR DPRD JATENG

Kemudian, di RSUD Tugurejo Semarang yang awalnya anggaran sebesar RP 1 miliar untuk pembuatan ruang isolasi juga tidak terpakai. Pemerintah, kata dia, menyatakan RSUD Tugurejo telah mendapatkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membuat ruang isolasi.

Kemudian, anggaran yang dikelola Disporapar Jateng juga belum direalisasikan, yakni sebesar Rp 2,077 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk bantuan uang usaha produkti dan ekonomi kreatif di sektor pariwisata. "Di Disporapar juga masih 0 persen lantaran, katanya, dari pusat sudah ada bantuan serupa. Informasinya, menunggu dulu dari pusat sebanyak 38 ribu paket bantuan selesai terlebih dahulu, baru dari provinsi," jelasnya.

Menurut dia, hal itu jadi rapor merah untuk Pemprov Jateng terkait penyerapan dana penanganan covid. Selain itu, Sriyanto juga menanyakan pendataan yang dilakukan dinas terkait. Seharusnya, kata dia, data dari provinsi dan pusat saling melengkapi.

Pria menjabat Wakil Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Jateng itu menambahkan, setelah mendapat penjelasan dari Sekda Jateng, Banggar meminta semua OPD yang mengampu dana Covid-19 untuk membuat laporan tertulis penggunaan anggaran. Banggar juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemprov Jateng merinci refocusing dana Covid yang berasal dari pergeseran anggaran mana saja.

"Semuanya sudah refocusing, termasuk dewan, tapi kalau pengelolaannya kacau balau begini, gagap, tidak siap dan tidak tepat guna, ya rugi semua," jelas dia. Menurutnya, meskipun anggaran ini termasuk BTT atau untuk penanganan kegawatdaruratan bencana, namun dewan tetap memiliki hak pengawasan.

Sementara anggota DPRD Jateng lainnya, Riyono meminta swab test massal dan tracing terhadap klaster baru perlu digencarkan lagi. Ia menyebtu, klaster baru yang perlu lebih digencarkan soal penelusurannya adalah Grobogan, Kudus, Wonogiri, Jepara, Kota Semarang dan terbaru di Pemalang serta RS Moewardi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo menjelaskan jika temuan kasus yang meningkat lantaran dipengaruhi tracing kontak yang aktif yang dilakukan pihaknya. "Lalu juga karena kami melakukan testing. Tracing dan testing ini kami tingkatkan secara sistematis, terstruktur, dan masif," jelasnya.

Karena dua langkah itu dilakukan dengan intesitas tinggi, data hasil pemeriksaan akan semakin banyak diketahui, termasuk yang positif. "Jadi, yang positif bisa kami temukan. Karena yang positif ini banyak yang tidak bergejala atau asimptomatis sehingga kalau kita tidak cari atau tes ya tidak ditemukan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta agar menggenjot kapasitas tes di laboratorium Covid-19 yang ada di Jateng dari 2.000 menjadi 4.991 tes perhari. Daerah yang menjadi prioritas pemeriksaan adalah Semarang Raya dan Solo Raya.

"Kenapa daerah itu yang jadi prioritas, karena masukan dari tim ahli kami terkait peningkatan kasus di daerah-daerah itu cukup tinggi. Selain itu, Pantura juga cukup bahaya dan menjadi perhatian," ujarnya baru-baru ini. **(mam)**